



EDUKASI BENCANA KEKERINGAN DAN KESIAPSIAGAAN WARGA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ida Surya^{1,2}; I Gusti Ngurah Suwetha¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Corresponding author: idasurya@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Geologically, Indonesia is located at the confluence of three of the world's main plates, namely the Indo-Australian Plate, the Eurasian Plate, and the Pacific Plate, which often cause disasters, for example drought. Central Lombok Regency is one of the regencies in West Nusa Tenggara, with these two seasons, most often hit by drought disasters, considering that the rainfall in Central Lombok is very small. So that disaster education and preparedness are needed for residents. This article uses qualitative research methods. The results of the study show that climate field schools have an important role in disaster education. Climate field school is a form of education for farmers that is very useful especially in understanding the weather and climate combined with new agricultural techniques that will allow farmers to plant different crops at different times of the year. Meanwhile, for preparedness, it is carried out through several programs in the form of urging and asking farmers to be disciplined in carrying out cropping patterns according to the zoning in which they are located (rice-padi-palawija or padi-palawija-palawija), mapping of land related to cropping patterns, planting rice variety that requires little water, namely the Situpagendit variety, and urges farmers to insure their rice plants, which is Rp. 36.000/ Ha for one planting season at PT. JASINDI.

Keywords: *Indonesia's geological location, disaster, disaster education.*

ABSTRAK

Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik yang sering menimbulkan kebencanaan, contohnya bencana kekeringan. Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat, dengan memiliki dua musim tersebut, paling sering dilanda oleh bencana kekeringan, mengingat curah hujan yang ada di Lombok Tengah sangat kecil. Sehingga dibutuhkan edukasi bencana dan kesiapsiagaan kepada warga. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah lapang iklim memiliki peran penting dalam edukasi bencana.

Copyright (c) 2021 Ida Surya, I Gusti Ngurah Sweta



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International
License.

Sekolah lapang iklim merupakan salah satu bentuk edukasi bagi petani yang sangat besar manfaatnya terutama dapat memahami cuaca dan iklim yang dikombinasikan dengan teknik pertanian baru akan memungkinkan petani untuk menanam tanaman yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam satu tahun. Sementara untuk kesiapsiagaan dilakukan melalui beberapa program berupa menghimbau dan meminta para petani untuk disiplin melakukan pola tanam sesuai dengan zonasi dimana dia berada (padi-padi- palawija atau padi-palawija-palawija), melakukan pemetaan lahan berkaitan dengan pola tanam, menanam paritas padi yang sedikit memerlukan air yaitu varietas Situpagendit, dan menghimbau para petani untuk mengasuransikan tanaman padinya yaitu Rp. 36.000/ Ha untuk satu kali musim tanam pada PT. JASINDI.

Kata kunci: Letak Geologis Indonesia, Kebencanaan, Edukasi Kebencanaan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta untuk menwujudkan pelayanan publik yang baik dan efektif dan berkualitas tentu di dukung adanya sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab punya integritas dan kredibilitas. Secara. Sistem desentralisasi membawa pemerintah lebih dekat dengan masyarakat bila terjadi masalah masalah misalnya bencana alam. pemerintah daerah diharapkan lebih cepat bertindak serta didukung dengan regulasi untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan program program atau kegiatan kegiatan, Berlakunya otonomi daerah memberi peluang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri daerahnya agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Menurut data BPS, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari “Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km². Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut.

Menurut BPS. Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang terdiri

dari “Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km². Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di Pulau Lombok, dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m. Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6° - 24,5°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember”.

Sebagai daerah tropis, Nusa Tenggara Barat mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %. Melihat kondisi yang demikian, maka nyaris setiap tahun Kabupaten Lombok Tengah sering dihadapkan dengan bencana kekeringan, yang sangat besar dampaknya, terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Lombok Tengah, penentuan kelas kapasitas berdasarkan

rata-rata kelas seluruh kecamatan terpapar bencana kekeringan. “Berdasarkan table tersebut, terlihat bahwa untuk menghadapi ancaman bencana kekeringan, kapasitas Pemerintah Daerah Lombok Tengah dan masyarakat desa/kelurahan perlu lebih ditingkatkan lagi guna mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat kejadian bencana kekeringan” (Dokumen Kajian Kapasitas Bencana Kabupaten Lombok Tengah, 2017-2021: 26).

Hampir setiap tahun Kabupaten Lombok Tengah mengalami bencana kekeringan, kalau melihat kasus kekeringan pada tahun 2019, jumlah kebutuhan air bersih sekitar 1.500 tengki dengan titik kekeringan di puluhan desa, untuk lahan pertanian memang ada ribuan hektar yang mengalami gagal panen di wilayah bagian selatan karena debit air irigasi yang menyusut. Kecamatan yang hampir setiap tahun gagal panen seperti kecamatan pujut, Praya Barat, Praya Barat dayadan sebagian di Kecamatan Praya Tengah

Karena kondisi yang rutin seperti ini setiap tahun, Pemda Lombok Tengah sudah menyiapkan anggaran penanganan krisis air bersih akibat kekeringan, anggaran tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan warga.

Tujuan penelitian adalah: untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah di lokasi penelitian di dalam menanggulangi bencana, khususnya bencana kekeringan dengan cara memberikan edukasi kepada warga masyarakat, serta membangun sikap kesiapsiagaan untuk menekan korban akibat bencana kekeringan yang terjadi.

KAJIAN TEORI

Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Edukasi tidak hanya bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu yang paling penting adalah edukasi masalah moral atau adab manusia. Karena seberapa pun pintarnya seseorang, jika

tidak punya adab atau berperilaku buruk, maka tidak akan berguna bagi kehidupan orang banyak”. Kabupaten Lombok Tengah yang hampir setiap tahun dihadapkan dengan bencana kekeringan. Maka untuk menanggulangi itulah perlu ada edukasi kebencanaan kepada warga masyarakat.

Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis jenis bencana adalah: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan bencana kekeringan.

Kekeringan merupakan peristiwa langkanya keberadaan air di suatu daerah pada waktu tertentu dan diakibatkan oleh beberapa peristiwa tertentu. Peristiwa sudah bisa disebut dengan kekeringan ketika hanya ada satu sumber air yang masih aktif dan digunakan untuk beberapa desa, atau ketika masyarakat harus mencari air hingga jauh beberapa kilometer dan mereka harus mengantri untuk mendapatkannya. Setidaknya inilah potret yang terjadi di Indonesia ketika beberapa media memberitakan kekeringan yang ada di Indonesia” (<https://ilmugeografi.com/bencana-alam/kekeringan>).

Kekeringan adalah salah satu bencana yang terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi empat, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi.

Menurut Sukamto dalam bukunya Manajemen Antisipasi Bencana, bahwa “bencana kekeringan dapat menimpa siapa dan apa saja, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Untuk tumbuhan atau

tanaman, bencana kekeringan dapat berakibat fatal karena dapat menyebabkan gagal panen dan untuk manusia dapat berupa kelangkaan air bersih” ...“Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTB, justru sangat sering menghadapi bencana kekeringan . Kekeringan merupakan ancaman yang paling sering mengganggu sistem dan produksi pertanian terutama terhadap tanaman pangan, kekeringan tidak saja dalam luas dan intensitas serta dampaknya tetapi juga perubahan sebaran wilayah yang terkena kekeringan.

Kekeringan juga dapat terjadi karena masyarakat suatu daerah belum bisa mengelola sumber daya air yang ada secara baik, ataupun prasarana sumber daya air yang kurang. Kekurangan sumber air pun dapat menjadi penyebab bencana ini. Ketika sumber air (mata air, sungai, dan lainnya) mengering maka tidak dapat memenuhi kebutuhan air manusia. Begitu pula ketika sumber air tersebut dimanfaatkan terlalu berlebihan hingga airnya habis maka pemanfaatan sumber daya air tidak dapat berkelanjutan”. Keadaan akan semakin parah ketika sumber air yang ada di suatu wilayah jumlahnya sedikit dan jaraknya yang jauh. Sumber air yang jaraknya jauh tersebut akan semakin menyulitkan masyarakat ketika kekeringan melanda, apalagi ketika sumber air tersebut merupakan sumber air yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Mau tidak mau masyarakat harus mengambil air di tempat tersebut” di (<https://foresteract.com/kekeringan/>).

Kesiapsiagaan, adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna (UU.RI.No.24 Tahun 2007). Sedangkan kesiapsiagaan menurut Carter (1991), adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu

untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna” (Khambali,2017: 53).

Menyimak pengertian ini, setiap orang atau individu maupun selaku kelompok komunitas diharapkan mampu mengantisipasi sesuatu kondisi secara cepat dan tepat jika terjadi suatu bencana. Lebih-lebih pada unit pemerintahan hendaknya mampu membangun kesiapsiagaan setiap saat, menghadapi mitigasi kebencanaan, dan pada kondisi bencana kekeringan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu membangun suatu system pemerintahan yang berbasis lingkungan dalam upaya membangun pemerintahan hijau atau “*green government*”. Menurut Sadu Wasistiono, dalam bukunya Pengantar Ekologi Pemerintahan, Edisi Revisi, 2013 menyebutkan, “Peran Pemerintah dalam suatu Negara sekurang-kurangnya mencakup 5 hal penting, yaitu; (1). Penjaga kedaulatan bangsa dan Negara, (2). Pembuatan kebijakan public, (3). Pemberian pelayanan public, (4). Penjaga kelestarian wilayah Negara, dan (5). Menjaga keharmonisan dan dinamika bangsa”.

“... Untuk dapat menjalankan peran tersebut perlu dibangun paradigma baru bagi para penyelenggara Negara dan penyelenggara pemerintahan subnational, yakni paradigma pemerintahan pro lingkungan hidup atau “*green government*”. *Green government*, adalah; “*Government agencies at state and local levels working to build sustainable communities*” yang dimaksud dengan “pemerintahan hijau”, adalah lembaga-lembaga pemerintahan membangun masyarakat yang berkelanjutan”. (2013: 33). Dari pernyataan ini, Pemerintah Daerah mampu melaksanakan *sustainable development*, atau pembangunan berkelanjutan, dengan mempertahankan lingkungan hidup di daerah masing-masing.

“Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan, dan pelatihan personel. Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat”. (2017: 53).

Memperhatikan pemahaman tentang kesiapsiagaan yang dinyatakan di atas, kiranya semua komponen di jajaran Pemerintah Daerah hendaknya mampu mengedukasi jajarannya, komunitas-komunitas, serta warga masyarakat sehingga ketika terjadi kejadian yang luar biasa/bencana, semua komponen itu tidak panik, dan siap siaga untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi, akibat bencana alam itu.

METODE

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan untuk membahas Edukasi Sadar Bencana Kekeringan dan Kesiapsiagaan Warga Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah adalah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilaksanakan dengan metode; “Penelitian Kebijakan (*Policy Research*)”. “Penelitian kebijakan adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini berupa peraturan, Undang-Undang, surat keputusan, dan segala hal yang berhubungan atau memiliki kekuatan hukum”.

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan studi dokumen dan kegiatan wawancara dengan para informan, serta observasi yang dilakukan dengan mengunjungi lokasi-lokasi penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, dan mengadakan konfirmasi dengan unit-unit terkait

berkenaan dengan data terkait yang dianggap perlu untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh sebelumnya. Informasi dimaksud dari diperoleh dari pihak yang menjadi informan penelitian, yaitu para pejabat yang terkait di Pemerintah Daerah, Kecamatan, serta masyarakat yang menjadi warga masyarakat di lokasi penelitian.

Jenis dan sumber data yang dihimpun dan diolah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Jenis data primer, adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai hal-hal yang menyangkut kebencanaan yang sering menimpa daerah penelitian, terutama bencana kekeringan.

Jenis data sekunder, adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari berbagai literature, terutama yang menyangkut kebencanaan, serta teori-teori lainnya yang berkaitan dengan kebencanaan, yang sering melanda wilayah atau daerah penelitian, misalnya: Manajemen Penanggulangan Bencana, Manajemen Antisipasi Bencana, dan sebagainya. Termasuk juga dokumen-dokumen penting yang menyangkut kebencanaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kelompok ini, untuk mendapatkan primer dan data sekunder, adalah sebagai berikut:

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku/literature dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan, dan juga studi kepustakaan melalui dunia maya atau *internet*, yang berkaitan dengan tema dan topic penelitian.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data primer kualitatif yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab dengan sejumlah informan

penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan berdasarkan Pedoman Wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka. Pokok-pokok pertanyaan (*leading questions*) disusun berdasarkan rujukan teori tentang kebijakan publik menurut Edwards III yang menyebutkan ada 4 (empat) variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik itu sendiri, yaitu: (1). Komunikasi, (2). Sumber daya, (3). Disposisi atau sikap, dan (4). Struktur birokrasi

HASIL PEMBAHASAN

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang beribukota di Kota Praya. Secara geografis Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi 116⁰05' -116⁰24' BT dan 8⁰24' - 8⁰57' LS.

Kesadaran masyarakat akan pemanasan global telah menggugah bangsa di dunia termasuk Indonesia untuk melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi dampak buruknya. Para petani yang paling merasakan akibat kekeringan. Dampak air yang tidak cukup sawah akan segera mengering dan panel gagal, kerugian ekonomi petani sudah di depan mata. Kekeringan tetap menjadi ancaman kalau program reboisasi tidak diintensifkan untuk mengembalikan wilayah resapan air. Para petani yang sawahnya mengalami puso akibat kekeringan yang berkepanjangan terancam resiko mengalami rawan pangan dan gizi. Kerawanan pangan dan gizi muncul apabila masyarakat tidak mampu lagi mengakses pangan secara cukup untuk mempertahankan kehidupan yang layak dan sehat.

Dampak perubahan iklim tidak hanya terkait dengan pemanasan suhu permukaan bumi, namun lebih penting terkait dengan pemanasan suhu permukaan bumi, namun lebih penting terkait dengan dampaknya terhadap kerentanan pangan. Perubahan pola

musim yang tidak teratur menjadikan para petani sulit mengatur perencanaan dan masa panen.

Salah satu dampak kekeringan yang harus diwaspadai adalah kurangnya sumber air minum, jika sumber air minum tidak tercukupi dengan baik manusia akan mengalami dehidrasi yang mana sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Dampak kekeringan yang selanjutnya yang patut diwaspadai adalah sumber air untuk sehari-hari menjadi berkurang. Saat ini kekeringan menjadi ancaman yang serius dikarenakan jika hal ini terjadi terus menerus dan kualitas hidup manusia yang terkena kekeringan akan menjadi menurun lama bisa mengganggu kesehatannya karena lingkungan kurang sehat. Sebagian besar tanaman banyak yang mati saat musim kemarau karena tidak ada air yang digunakan sebagai sumber kehidupannya dan hanya beberapa tanaman saja yang bisa bertahan selebihnya tanaman lain akan mati. Perlahan lahan terutama padi dan palawija. Tanaman selain menjadi sumber oksigen yang menjadi sumber makanan bagi manusia juga hilang bukan hanya manusia saja namun juga binatang beberapa akan sangat cepat mati karena kekeringan namun ada beberapa tanaman yang bisa bertahan.

Akibat yang sangat membahayakan apabila panen gagal (puso) adalah terjadi kelaparan massal, dengan keterbatasan ketersediaan pangan yang terbatas maka sangat berpengaruh pada kelayakan hidup masyarakat misalnya kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, terganggunya keamanan, serta rendahnya Sumberdaya Manusia. Kekeringan yang melanda suatu daerah akan berdampak pada kelaparan massal karena sumber pangan masyarakat telah mati, tanaman pertanian, perkebunan, tidak akan bertahan lama tanpa adanya air yang dapat menyirami mereka.

Dampak kekeringan lainnya adalah lingkungan menjadi kotor air mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat banyak

salah satunya adalah sifat air adalah mengalir yang dapat menghanyutkan berbagai kotoran yang ada di lingkungan. Dampak kekeringan lagi adalah banyak bibit penyakit, penyakit yang timbul karena sangat sedikitnya air karena kekeringan air sangat terbatas dan kemungkinan air untuk mandi sangat terbatas. Saat kekeringan terjadi beberapa binatang yang aneh dan jarang kita ketahui akan muncul di hadapan kita. Binatang-binatang yang biasanya muncul adalah serangga yang mengganggu manusia.

Masyarakat Lombok Tengah yang mengalami kekeringan tentu mengalami tekanan ekonomi dan akan melakukan strategi coping yaitu mengurangi frekuensi makannya dan mencari bahan pangan konvensional yang dalam situasi normal tidak pernah dia lakukan misalnya mencampurkan jagung dengan beras. Terhadap permasalahan tersebut anggota keluarga yang tidak pernah mencari nafkah anak dan kaum perempuan mulai terjun bekerja untuk mendapatkan upah.

Badan meteorology Klimatologi dan Geofisika (BMKG) daerah Lombok Barat dan Lombok Tengah menyebutkan kemarau pada tahun 2019 sebagai dampak dari El Nini, sehingga beberapa Kecamatan mengalami kekeringan. Petugas Badan BMKG Lombok Barat dan Lombok Tengah Anas Baihaki kekeringan semakin meluas (2019) sedangkan tahun 2020 tidak terlalu mengalami kekeringan cenderung agak basah.

Berdasarkan situasi tahun 2019 perlu dilakukan beberapa langkah yaitu mitigasi bencana kekeringan dengan cara mitigasi kekeringan dengan cara memantau dan menganalisis kekeringan meteorologi di Kabupaten Lombok Tengah, upaya untuk memantau dan menganalisis kekeringan menghubungkan antara parameter iklim secara sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan analisis secara kuantitatif terhadap anomaly iklim sehingga dapat

menunjukkan tingkat kelas atau derajat kekeringan dimana tingkat kekeringan suatu wilayah berada antara satu dengan yang lainnya satu metode indeks yang digunakan untuk analisis kekeringan adalah *Standardized Precipitation Indeks* (SPI) dimana menggunakan data curah hujan sebagai data masukan dalam analisisnya.

Dampak kekeringan di Indonesia dan solusinya sangat perlu diperhatikan tidak hanya oleh Pemerintah Lombok Tengah tetapi masyarakat Lombok Tengah di beberapa Kecamatan yang terkena dampak kekeringan, sehingga masyarakat bahu membahu membatasi kekeringan yang terjadi di Lombok Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah harus bekerja keras untuk membuat kebijakan penanggulangan bencana kekeringan. Kabupaten Lombok Tengah sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Beberapa aturan dan kelembagaan dijadikan sebagai indikator untuk menentukan rekomendasi tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan risiko bencana di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu, perlu adanya penguatan kebijakan dan kelembagaan agar tercapainya sasaran yang efektif. Aturan dan kelembagaan tersebut yaitu peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan.

Beberapa Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah

1. Pencegahan (Prevention) Dan Peringatan (Mitigation)

Pencegahan dan mitigasi bencana merupakan tahapan pengelolaan bencana yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Pencegahan dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan mengobati bahaya tertentu dalam hal ini dampak dari kekeringan yang sewaktu waktu melanda Kabupaten Lombok Tengah, sehingga resiko yang ditimbulkan

dapat ditekan semaksimal mungkin. Kegiatan mitigasi lebih dititik beratkan pada upaya penyusunan berbagai kebijakan dan strategi yang bertujuan mengurangi resiko bencana kekeringan

Beberapa kebijakan dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Bapak H. Lalu Iskandar MM bertempat di ruang kerjanya yaitu:

- a. Melakukan pelatihan bagi aparat/petugas Dinas dan Ketua Kelompok Tani terutama yang berkaitan dengan iklim
- b. Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menghidupkan dan melestarikan kearifan lokal dan awiq yang masih berlaku di desa, Menjadi sebuah tatanan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga ikut andil dalam penanganan bencana, mitigasi menjadi sebuah pemahaman yang muncul dan berkembang secara alami di dalam kehidupan masyarakat. Awiq awiq adat yang kuat dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya air yang ada, dan awiq awiq tersebut wajib ditaati oleh semua masyarakat atau masyarakat lainnya guna melestarikan lingkungan supaya keamanan dan ketertiban terjaga. Masyarakat Lombok Tengah suku sasak memandang hutan pada dasarnya terbagi dalam dua kawasan yakni pawing dan gawah. Pawing merupakan kawasan hutan yang dikeramatkan dimana terdapat sekumpulan pepohonan besar yang biasanya terdapat sumber mata air sehingga tidak dapat diganggu sama sekali. Sedangkan kawasan gawah merupakan daerah dimana terdapat pepohonan dan aneka satwa sebagai tempat berburu dapat dikelola dan dipetik hasilnya secara lestari atas ijin dari pemangku.

- c. Mendorong para petani untuk mengasuransikan tanaman padinya
- d. Untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan kegiatan menanam banyak pohon yang bermanfaat. Seperti kita ketahui salah satu manfaat menanam pohon adalah menyerap dan menyimpan air yang tersimpan dalam di bawah akar pohon

2. Edukasi Bencana Kekeringan Sektor Pertanian

Edukasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada peserta didik dan mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang lebih baik. Dalam meminimalisir dampak kekeringan yang hamper setiap tahun melanda kabupaten Lombok Tengah salah satu program dan kegiatan dari Dinas Pertanian tanaman pangan adalah melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan Ketua Kelompok Tani terutama dalam meningkatkan kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam ini sangat penting untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dengan keadaan yang diinginkan. Adanya kesenjangan ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menjembatani dengan mengadakan Diklat yang anggarannya lewat APBD II atau dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti LSM dan atau BMKG. Diklat yang diadakan harus mampu meningkatkan kemampuan, keterampilan dan merubah perilaku para Ketua Kelompok Tani beserta anggota/ petani dalam menerapkan pola tanam. Diklat yang diadakan dapat memberikan kontribusi dalam menghadapi dan mengurangi dampak kekeringan yang hampir setiap tahun melanda Kabupaten Lombok Tengah dan NTB pada umumnya, seperti: (Wignyo Adiyoso, Manajemen bencana, Bumi Aksara, 2018. Hal. 284)

- a. Berkontribusi terhadap ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan melalui penggunaan konsep, metode dan alat dalam manajemen bencana seperti penilaian resiko dan kapasitas, kesiapan dan perencanaan kontingensi serta perencanaan penggunaan lahan.
- b. Bekerja dengan pengembangan kapasitas dan manajemen proyek untuk manajemen resiko bencana ditingkat local, nasional maupun internasional.
- c. Memanfaatkan dan dapat berkontribusi untuk penelitian dibidang pengelolaan bencana.

Kegiatan diklat yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah baik yang dianggarkan lewat APBD II maupun bekerjasama dengan BMKG adalah berupa Sekolah Lapang Iklim (SLI). SLI ini bertujuan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Anas Baihaki pada hari Rabu 23 September 2020 di ruang kerjanya adalah “Merupakan kegiatan dari BMKG pada sector pertanian yang bertujuan meningkatkan wawasan petani dan aparat tentang informasi iklim dan cuaca BMKG dan menggunakan informasi tersebut untuk kegiatan pertanian. Masalahnya adalah terdapat jarak/ gap pada pemahaman informasi iklim yang disampaikan BMKG kepada public termasuk para petani, seperti memahami iklim, fenomena El Nino dan La Nina dan juga perbedaan antara cuaca dan iklim”.

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani sehingga diperlukan perhatian yang lebih terhadap fenomena iklim yang berdampak pada kegiatan usaha tani. Jika tidak ada upaya peningkatan kapasitas petani akan bisa mengancam keamanan pangan sebagai akibat bencana alam terkait dengan cuaca dan iklim. Petani perlu tahu bagaimana bersikap menghadapi variasi iklim yang mempengaruhi produktifitas panen mereka. Informasi iklim ini masih sulit difahami utamanya di kalangan petani

yang mengalami langsung pengaruh iklim pada kehidupan mereka. Dengan memahami cuaca dan iklim yang dikombinasikan dengan teknik pertanian baru akan memungkinkan petani untuk menanam tanaman yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam satu tahun. Bergantung pada tanaman mana yang paling cocok dengan cuaca / iklim saat itu. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan produktifitas dan pendapatan para petani.

Sekolah Lapang Iklim (SLI) ini memiliki tiga tahapan/ tingkatan yang disebut SLI Tahap I, II dan III. Tahapan ini berdasarkan jenis peserta dan tujuan pelaksanaannya. Pada SLI tahap I, pesertanya adalah para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dari Lembaga/ Dinas/ Instansi terkait sebagai penghubung antara BMKG dengan para petani untuk mengenalkan program SLI BMKG. SLI tahap II, pesertanya adalah para penyuluh pertanian, penyuluh hama dan penyakit tanaman dan ketua-ketua kelompok tani. SLI tahap III, pesertanya adalah para petani dengan praktik langsung bercocok tanam dalam satu musim.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu 27 Juli 2020 bertempat di ruang kerjanya, mengatakan:

“Berhubung keterbatasan dana pelaksanaan SLI yang dibiayai melalui APBD II ini baru dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun anggaran 2018 untuk SLI tahap II yang diikuti oleh para penyuluh pertanian dan beberapa orang ketua kelompok tani. Biasanya tiap tahun kegiatan serupa selalu ada dari BMKG yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan kita”.

Untuk kegiatan serupa kami juga mendapatkan informasi dari BMKG yang disampaikan oleh Bapak Anas Baihaki

pada hari Rabu 23 September 2020, bertempat di ruang kerjanya, bahwa:

“Kegiatan SLI merupakan program dan kegiatan dari BMKG pusat yang hanya diberikan kepada BMKG yang menurut penilaian pusat berprestasi. Untuk BMKG yang ada di NTB sudah beberapa kali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan ini tapi untuk pelaksanaannya diupayakan pemerataan untuk semua kabupaten kota. SLI yang sudah dilaksanakan baru SLI tahap II saja dan untuk tahun ini (tahun anggaran 2020) Insya Allah BMKG NTB kembali dipercaya untuk melaksanakan. Penyelenggaraan untuk tahun ini diperkirakan pada bulan oktober November dan direncanakan diadakan di dua kabupaten yaitu Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dari pihak BMKG sangat berharap ada partisipasi dari masing-masing kabupaten kota untuk ikut serta menganggarkan kegiatan SLI sehingga bisa lebih banyak ketua-ketua kelompok tani bila perlu para petaninya juga bisa ikut kegiatan pelatihan’.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa ketua kelompok tani yang kami jadikan sampel dalam penelitian ini tentang keberadaan dari SLI ini, semuanya mengatakan tidak tau dan tidak pernah mengikuti Sekolah Lapang Iklim (SLI). Adapun ketua kelompok Tani yang kami datangi adalah: Kelompok Tani Beriuk Tinjal Dasan Baru kopang, Kelompok Tani Jakse Bangun Barejulat Jonggat dan Kelompok Tani baru bangun bonder Praya Barat. Berdasarkan hasil wawancara kami tersebut dapat disimpulkan bahwa SLI ini merupakan salah satu bentuk edukasi bagi petani yang sangat besar manfaatnya terutama dapat memahami cuaca dan iklim yang dikombinasikan dengan teknik pertanian baru akan memungkinkan petani untuk

menanam tanaman yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam satu tahun. Bergantung pada tanaman mana yang paling cocok dengan cuaca / iklim saat itu yang pada akhirnya hal ini akan meningkatkan produktifitas dan pendapatan para petani. Tapi sayang kegiatan tersebut baru satu kali dilaksanakan oleh Pemda Lombok Tengah yaitu pada tahun anggaran 2018, ini menunjukkan bahwa perhatian Pemda masih minim. Hal ini juga kami dapatkan informasinya dari tiga kelompok tani yang dijadikan sampel tidak satupun ketua/pengurusnya pernah mengikuti pelatihan. Demikian juga dengan BMKG yang mempunyai program tersebut, bahwa SLI tidak dianggarkan untuk semua BMKG yang ada diseluruh Indonesia tapi hanya diberikan kepada beberapa BMKG daerah yang dianggap berprestasi. Program lain yang juga bisa dikategorikan sebagai kegiatan edukasi bagi petani dalam membaca tanda-tanda alam yang berkaitan dengan iklim adalah penyampaian informasi melalui Berugak Dese. Berugak dese merupakan salah satu sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di setiap desa atas program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah Ir H.L Iskandar.MM pada hari Rabu 22 Juli 2020 di ruang kerjanya, mengatakan:

“Dalam rangka menghidupkan kembali kearifan local yang berkaitan dengan tanda-tanda alam yang menunjukkan akan datangnya suatu musim, maka Dinas Pertanian tanaman pangan bekerja sama dengan salah satu LSM di Lombok Tengah telah melakukan sosialisasi ke beberapa desa dalam tiga tahun terakhir ini “.

Berkaitan dengan kegiatan ini berdasarkan hasil wawancara kami dengan

beberapa kelompok tani diatas juga tidak efektif. Bahkan dari kelompok tani yang kami datangi tidak satupun mengetahui tentang keberadaan dari Berugak desa apalagi menyangkut kegiatan yang dilakukan. Ada kesan bahwa dari beberapa program unggulan yang dicanangkan oleh Pemda Lombok Tengah kurang tersosialisasikan dengan baik ke tengah-tengah masyarakat seperti Lemper Madu, Aik Meneng Tunjung Tilah empak Bau, ATM termasuk juga Berugak Dese ini.

Salah satu solusi yang kita lakukan adalah penggunaan air yang berlebihan halnya agak sulit dilakukan oleh beberapa orang karena sudah terbiasa boros pemakaian air bahkan dibiarkan mengalir tanpa dilakukan penghentian air yang mengalir seharusnya secukupnya kita menggunakan air yang penting sudah bersih dan higienis. Kita ketahui bahwa air mempunyai siklus tersendiri yaitu air yang kita gunakan dan air yang kita buang akan meresap kembali ke dalam tanah melalui penyaringan dan kemudian dan muncul sebagai sumber air yang baru, dan penggunaan air harus tetap hemat karena air yang merupakan sumber daya alam.

3. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah salah satu strategi penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahapan pra bencana saat ada potensi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tahapan ini merupakan unsur yang penting namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat. Kesiapsiagaan adalah tahap yang sangat strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya bencana.

Kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah melibatkan

orang-orang atau masyarakat umum khususnya dalam hal ini adalah para petani yang langsung terkena dampak dan meminimalisasi kerugian financial dan dampak negative lainnya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ir. H. Lalu Iskandar, MM Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu 22 September 2020 bertempat di ruang kerjanya, bahwa:

“Beberapa program dan kegiatan yang dipersiapkan dan dilakukan dalam mengantisipasi dan meminimalisir dampak dari kekeringan ini adalah: Menghimbau dan meminta para petani untuk disiplin melakukan pola tanam sesuai dengan zonasi dimana dia berada (padi-padi- palawija atau padi-palawija-palawija); Melakukan pemetaan lahan berkaitan dengan pola tanam; Menanam paritas padi yang sedikit memerlukan air yaitu varietas Situpagendit; Menghimbau para petani untuk mengasuransikan tanaman padinya yaitu Rp. 36.000/ Ha untuk satu kali musim tanam pada PT. JASINDI.

Dari beberapa program dan kegiatan tersebut tidak semua bisa berjalan efektif, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan pada kesempatan yang sama, bahwa: “Himbauan kepada para petani untuk mentaati pola tanam walaupun sudah ada Perdanya yaitu Perda Nomor 2 Tahun 1992 tentang pengaturan pola tanam, pelaksanaannya tidak efektif karena ada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang system budi daya pertanian berkelanjutan yang merupakan pengganti dari UU No. 12 Tahun 1992 tentang system budi daya pertanian yang memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam tanaman apa saja yang mereka inginkan.

Selanjutnya dikatakan bahwa, untuk himbauan menggunakan varietas Situpagendit yang tahan walaupun sedikit air memang lebih efektif tetapi ada juga para petani yang tidak mau karena mereka sudah terbiasa menggunakan varietas yang lain. Alasannya bermacam-macam seperti rasanya kurang enak nasinya agak keras dan hasilnya tidak sebanyak varietas yang selama ini mereka biasa tanam. Sedangkan untuk asuransi tanaman padi, ini memang merupakan program baru sehingga belum banyak petani yang mengikuti. Berkaitan dengan asuransi pertanian ini dari beberapa kelompok tani yang kami jadikan sampel memang tidak ada satupun yang pernah mengasuransikan tanaman padinya.

Dari uraian diatas terlihat bahwa dari beberapa program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah khususnya dalam mengantisipasi dan meminimalisir (kesiapsiagaan) dampak kekeringan, tidak semua bisa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih, kurangnya sosialisasi dan pengaruh perilaku dan kebiasaan para petani yang selama ini selalu menanam padi sehingga enggan untuk menanam jenis tanaman yang lain seperti palawija.

Membuat sumur bor sangat membantu kebutuhan hidup manusia sehari hari terutama tanaman sawah, kebun dan pekarangan. Kabupaten Lombok Tengah banyak sekali warga yang membuat sumur bor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari baik itu secara sendiri maupun secara berkelompok membuat sumur bor karena di Kabupaten Lombok Tengah kalau sudah musim kemarau debit air PDAM sangat kurang bahkan tidak ada. Para petani yang sudah membuat sumur bor di dekat sawah dan kebunnya sangat terbantu untuk menyiram tanamannya tentu tanaman yang ditanam disesuaikan dengan musim setelah mendapat informasi dari

penyuluh pertanian dan BMKG dengan demikian tidak terjadi yang dinamakan kekeringan massal para petani masih bisa mendapat hasil dari tanamannya. Khusus bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah ketika musim kemarau atas info dari dinas pertanian para petani rata menanam buah Kelendi dan Melon. Informasi dari penyuluh Pertanian Kecamatan Praya Barat Lalu Abdi sekarang lagi sedang di sosialisasikan kepada para petani melalui kelompok petani untuk menanam bawang merah.

4. Tanggap Darurat.

Tanggap darurat (*response*) adalah tindakan segera yang diambil sebelum dan sesudah dampak bencana yang diarahkan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi harta benda yang berkaitan dengan gangguan langsung, kerusakan dan efek lainnya yang disebabkan oleh bencana. Perencanaan dan persiapan kesiapsiagaan tanggap darurat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan upaya tanggap darurat. Tanggap darurat adalah tindakan segera yang dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Beberapa program dan kegiatan Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Lombok Tengah yang berkaitan dengan tanggap darurat akibat dampak kekeringan ini, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinasnya Bapak Ir. H. Lalu Iskandar MM pada hari Rabu 22 September 2020 bertempat di ruang kerjanya, bahwa:

“Beberapa program dan kegiatan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang berkaitan dengan bencana kekeringan ini adalah: Menginventarisir jumlah petani dan luas lahan yang terdampak

kekeringan; Memberikan bantuan benih bagi petani yang mengalami gagal panen (benih padi, jagung dan atau kedelai); Memfasilitasi petani untuk mendapatkan ganti rugi bagi yang mengasuransikan tanaman padinya pada PT. JASINDO; Berkoordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah untuk pengaturan pembagian air pada lahan-lahan pertanian yang masih bisa diselamatkan sehingga meminimalisir terjadinya gagal panen.

Dari beberapa program dan kegiatan tersebut khusus untuk bantuan benih bagi petani yang mengalami gagal panen itu berasal dari pemerintah pusat sehingga terkadang penyalurannya sering kali terlambat. Seperti yang disampaikan oleh ketua kelompok tani Jakse Bangun dusun renjase barejulat jonggat bapak Fauzi pada hari Sabtu 26 september 2020 di rumahnya, bahwa “Bantuan berupa benih padi dari pemerintah yang diberikan kepada anggota kami sering terlambat sehingga tidak bisa dimanfaatkan pada musim tanam tersebut. Bantuan benih padi yang sudah ada selama ini datang pada saat anggota kami sudah menabur benih bahkan ada yang sudah mulai menanam.

Bantuan benih untuk petani yang mengalami gagal panen selama ini belum ada yang dianggarkan dari APBD II Kabupaten Lombok tengah, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah pada waktu dan tempat yang sama, bahwa, “Karena keterbatasan dana selama ini untuk pengadaan benih kita masih mengusulkan ke pemerintah pusat, lewat APBD II kita hanya mampu menganggarkan sekitar Rp.50 jutaan untuk kegiatan-kegiatan seperti rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Berkaitan dengan pengelolaan air untuk pertanian pada musim kemarau, guna menghindari kerugian petani yang lebih besar akibat gagal panen, Dinas

PUPR Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini Kabid Pengairan mengupayakan penggunaan air sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa efektif dan efisien. Seperti yang disampaikan kepada kami pada hari Rabu 5 Agustus bertempat di ruang kerjanya, bahwa, “Kekurangan air pada musim kemarau pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pasokan air dari hulu dan besarnya jumlah areal pertanian yang tidak diberikan ijin untuk menanam padi. Sebagai contoh pada musim tanam ke dua untuk tahun 2020 ini, dari 50 ribu Ha luas lahan yang diberikan ijin menanam padi hanya 20 ribu Ha, tapi di lapangan ada 11 ribu Ha tidak memiliki ijin.

Dari uraian diatas terlihat bahwa untuk kegiatan tanggap darurat dalam rangka menghadapi dan meminimalisir dampak kekeringan yang melanda para petani kita di Lombok Tengah perhatian pemerintah daerah masih sangat minim. Hal ini terlihat dari tidak tepatnya waktu penyaluran bantuan benih dan minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD II untuk kegiatan tersebut, pada hal bencana kekeringan ini hamper setiap tahun terjadi dan dampaknya sangat dirasakan oleh para petani kita. Demikian juga dengan besarnya jumlah lahan tanam padi (11 ribu Ha) yang tidak memiliki ijin ini menunjukkan bahwa efektifitas dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh aparat kepada petani kurang efektif

5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Tahap pasca bencana merupakan strategi untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya bencana (*recovery*) yang merupakan proses membantu masyarakat untuk kembali ke fungsi kehidupan seperti sebelumnya. Dalam melakukan pengelolaan pasca bencana terdapat beberapa kajian yang perlu dilakukan untuk menilai kebutuhan tentang perbaikan akibat dampak bencana yang biasa disebut pengkajian cepat (*rapid assessment*), meliputi penyantunan

dan pelayanan, konsolidasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Program dan kegiatan Pemda khususnya lewat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kekeringan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinasnya Bapak Ir. H. L Iskandar MM, pada waktu dan kesempatan yang sama seperti diatas bahwa:

“Berkaitan dengan perbaikan saluran irigasi, embung dan bendungan yang mengalami kerusakan akibat bencana kekeringan adalah merupakan kewenangan dari Dinas PU. Dinas Pertanian lebih memfokuskan diri pada mengaktifkan kegiatan dari kelompok tani sehingga penyampaian informasi-informasi dari atas akan bisa lebih cepat sampai. Demikian juga kalau ada pemberian bantuan seperti benih, tractor, mesin air atau bantuan fisik lainnya bisa tepat sasaran.”

Berkaitan dengan rehabilitasi saluran-saluran irigasi, embung-embung atau bendungan yang mengalami kerusakan / pecah-pecah akibat kekeringan ini, kepala bidang pengairan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu 5 agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya mengatakan, bahwa untuk rehabilitasi saluran-saluran irigasi, embung-embung dan bendungan selama ini sumber dananya dari Dana Alokasi khusus / DAK. Pembangunan embung

telah dilakukan pada dua tahun yang lalu sekitar tahun 2018 yaitu Embung Meretak Jumak di desa Waje Geseng Kopang yang pendanaannya dari Kementerian PDT. Pendanaan dari APBD II selama ini hanya sebatas biaya operasional dalam pengelolaan penyaluran air yang rata-rata setiap tahun sebesar Rp. 1,1 Milyar yang digunakan untuk honor hamper 60% dan sisanya untuk kegiatan rapat koordinasi dan Monev.

Dari uraian diatas terlihat bahwa perhatian Pemda Lombok Tengah terhadap bencana kekeringan ini khususnya yang berdampak pada sector pertanian masih relative kecil. Hal ini tercermin dari program dan kegiatan-kegiatan yang ada pada dua Dinas yaitu Dinas Pertanian dan Dinas PUPR yang sumber pembiayaannya dari APBD II sangat kecil. Ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat baik yang disalurkan melalui DAK atau hibah dari Bank Dunia masih sangat dominan.

6. Kesiapan Fasilitas Penanggulangan Bencana.

Penanganan bencana memerlukan kesiapan fasilitas berupa sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat dan jenis bencana yang akan dihadapi. Berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menangani dan menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah berupa:

a. Sumber Daya Manusia.

Penanganan bencana kekeringan diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi dan kemampuannya. Banyak permasalahan timbul ketika bencana kekeringan terjadi karena sumber daya yang terlibat dalam penanggulangan kurang memadai atau tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya.

Berkenaan dengan SDM ini seperti diuraikan diatas baik dari segi kwantitas maupun kualitas masih belum memadai. Seperti yang disampaikan oleh Kepala

Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Lombok Ir H.L. Iskandar MM pada hari Rabu 22 Juli 2020 bertempat di ruang kerjanya, bahwa

“Sebagai perpanjangan tangan di tiap-tiap kecamatan kita memiliki UPT dengan 12 orang KUPT dan hamper di tiap desa kita memiliki tenaga penyuluh sebanyak 119 orang dari 139 desa yang ada setelah terjadi pemekaran. Disamping itu juga ada 7 orang PNS yang berstatus sebagai Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) yang mempunyai kewenangan untuk menentukan status suatu wilayah apakah telah terjadi gagal panen/fuso atau tidak. Berkenaan dengan kualitas dari aparat yang ada masih perlu adanya peningkatan karena selama lima tahun terakhir belum pernah dianggarkan untuk kegiatan Diklat bagi aparat karena keterbatasan dana yang dimiliki Pemda.

Berbeda dengan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengairan bertempat di ruang kerjanya pada hari Rabu 5 Agustus 2020 bahwa,

“Kami sedikit mengalami kesulitan menyangkut SDM ini karena hamper 40 % penjaga pintu air sudah memasuki masa pensiun, dimana yang menggantikannya adalah tenaga-tenaga baru yang selama ini menjadi honorer di Dinas PUPR yang pengetahuan dan pemahamannya tentang tata kelola air masih perlu terus mendapatkan bimbingan.”

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa baik dari segi kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Dinas PUPR maupun di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Tengah masih perlu mendapat perhatian. Masih adanya desa yang belum ada PPL nya ditambah

dengan tidak pernah diadakannya Diklat bagi peningkatan kompetensi yang dianggarkan lewat APBD II membuat kinerja mereka kurang optimal. Demikian juga dengan Dinas PUPR yang hamper 40% dari penjaga pintu air sudah mengalami purna tugas dan diganti dengan tenaga-tenaga honorer yang kompetensinya masih minim.

b. Prasarana dan Material.

Bencana tidak dapat ditanggulangi dengan efektif dan cepat tanpa didukung oleh prasarana dan logistik yang memadai. Prasarana dan material merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana kekeringan, seperti misalnya adanya jaringan irigasi yang baik, bendungan yang mampu menampung air, pengadaan sarana produksi pertanian untuk membantu para petani yang terdampak bencana serta prasarana dan logistik lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu 5 Agustus bertempat di ruang kerjanya, bahwa:

“Kekurangan air yang terjadi pada musim kemarau karena berkurangnya pasokan air dari daerah hulu sehingga air tidak sampai ke daerah hilir. Berbicara tentang jaringan irigasi, embung-embung rakyat dan bendungan, kondisi dan jumlah serta panjangnya sudah sangat memadai. Sebagai solusi kita mengadakan koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat untuk meminta tambahan pasokan air dari Bendungan Aik Nyet yang ada di Sesaot, sedangkan untuk Lombok Tengah bagian timur kita mengadakan koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur untuk mendapatkan pasokan air dari Bendungan Pandan Duri.

PENUTUP

Fenomena alam munculnya anomaly iklim *El Nino dan La nina* mempengaruhi

lamanya periode musim hujan dan musim kering yang selanjutnya berimplikasi terhadap pergeseran musim tanam selanjutnya penurunan pangan sebesar 3,06% untuk setiap kejadian *El Nino*. Air merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman karena berfungsi pelarut hara tanaman di dalam tanah dan berperan dalam translokasi hara dan proses fotosintesis tanaman serta menentukan hasil tanaman. Sektor pertanian merupakan sector yang dominan dalam hal penggunaan air (44,6%), kemudian industri (35,5%), rumah tangga (8,4%) dan sisanya untuk perikanan, penguapan, meresap di tanah dan lainnya. Menurunnya ketersediaan air dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak maksimal sehingga memiliki potensi penurunan produksi pertanian pada musim kering yang sedang berjalan, baik karena menurunnya produktivitas maupun terjadinya puso, lebih jauh penurunan ini tidak hanya berpengaruh terhadap aspek fisik dan ekonomi atas pelaku usaha tani khususnya pemilik lahan tetapi juga berdampak lebih dalam kepada buruh tani dan para penggarap sawah yang bekerja diatas lahan tersebut. Oleh karena itu penurunan daya beli khususnya buruh tani dan penggarap juga memerlukan lapangan kerja yang lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ketika memasuki musim kemarau bencana kekeringan mengancam beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Tengah biasanya bencana kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau berkepanjangan sehingga membuat cadangan air semakin tipis, kejadian tersebut bukan pertama kali terjadi bahkan hampir setiap tahunnya sering terjadi bencana kekeringan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kekeringan salah satunya adalah para petani yang terancam tanamannya gagal panen karena kekurangan air, selain bencana kekeringan juga membuat ketersediaan air bersih

menjadi langka dan berikut upaya mengatasi bencana kekeringan.

Disarankan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah supaya menyiapkan anggaran yang cukup untuk peningkatan SDM Petani (sekolah Lapang, Bintek dll). Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk segera merealisasi pembangunan waduk pandan duri di Praya Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawan, 2011, *mengenal Bencana Alam*. Universitas Islam. Jakarta
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lombok Tengah, 2017. *Kabupaten Lombok Tengah Dalam Data*. BPS & Bappeda. Kab. Lombok Tengah.
- Bagir Manan, 1996, *Bentuk Bentuk perbuatan Hukum Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- Creswell John. W. 1994. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- David Osborne dan Ted Gaebler. 1996. *Mewirausahakan Birokrasi, Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, Pustaka Binaman Pressindo – Jakarta.
- Dwi Aprianita, Tantrina. 2007. *Mengenal Bencana Alam*, Logika Galileo – Jakarta.
- Edwards III, George, C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc, USA.
- Effendy, Khasan. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Indra Prahasta – Bandung.

I.G. Boy Darmawan, 20016, *Mitigasi Bencana Alam*, Graha Ilmu. Jakarta

Khambali, 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana*, Andi Surabaya.

Riduwan, 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta – Bandung.

Sadu Wasistiono, 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan, edisi revisi*. IPDN.Press Jatinangor.

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kulaitatif*. Alfabeta – Bandung.

Sukamto, 2015. *Menejemen Antisipasi Bencana*, Graha Ilmu Yogyakarta.

Wignyo Adiyoso, 2016, *Manajemen bencana pengantar dan isu isu strategis*. Sumber Aksara-Jakarta.

Lain-lain

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: 2 Th.2017. Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 – 2021.

<https://ntb-bisa.blogspot.com/2012/10/kondisi-geografis-propinsi-nusa.html><http://bpbd.pringsewukab.go.id/pengertian-bencana-dan-jenis-bencana/>.